

SOCIAL, ECONOMIC, AND CULTURAL ANALYSIS IN THE PREPARATION OF AMDAL ON THE LICENSING ACTIVITIES OF FOREST UTILIZATION BUSINESS (PBPH) IN THE PRODUCTION FOREST OF PT. PUTRA BARITO LESTARI

ANALISIS SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA DALAM PENYUSUNAN AMDAL PADA KEGIATAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PADA HUTAN PRODUKSI PT. PUTRA BARITO LESTARI

Abdurrahman¹, Hidayatullah², Muhammad Viki Firdaus³

¹⁾¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾ Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan
Jl. RTA Milono KM 3,5 Palangka Raya, 74874

Email: abdurrahman@itsnukalimantan.ac.id

ABSTRACT

The activity plan for the utilization of wood forest products in natural forests in production forests by PBPH PT. Putra Barito Lestari is administratively located in Katingan Tengah, Katingan Hilir, Tasik Payawan and Kamipang Districts, Katingan Regency, Central Kalimantan Province. The land cover conditions at the planned activity location of PT. Putra Barito Lestari consist of Swamp Scrub, Secondary Dryland Forest, Secondary Swamp Forest, Plantation, Mining, Shrub/Scrub, Swamp, and Open Land. In general, the activity plan for Forest Utilization Business Licensing (PBPH) in production forests by PT. Putra Barito Lestari is divided into 4 (four) stages of activity, namely the pre-construction, construction, operation and post-operation stages. This study uses an interview survey method where the data obtained is primary data from interviews in the field (in situ) and secondary data is taken from the BPS of Katingan Regency. There are 10 discussions in SOCIAL, ECONOMIC, AND CULTURAL ANALYSIS IN PREPARING AMDAL ON FOREST UTILIZATION BUSINESS LICENSING ACTIVITIES (PBPH) IN PRODUCTION FORESTS OF PT. PUTRA BARITO LESTARI Namely population, Livelihoods and Employment, Community Income Level, Community Expenditure Level, Land Ownership and Control, Facilities and Infrastructure, Customs and Habits, Social Processes, Community Attitudes and Perceptions, and Community Unrest and Potential Conflict.

The results of Interview Observations in the community in Katingan Tengah, Katingan Hilir, Tasik Payawan and Kamipang Districts showed that 77% of the community agreed, 14% disagreed and 8% were still hesitant.

Keywords: *Social, Economic, Cultural*

ABSTRAK

Rencana kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutanalam pada hutan produksi oleh PBPH PT. Putra Barito Lestari secara administratif terletak di Kecamatan Katingan Tengah, Katingan Hilir, Tasik Payawan dan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tutupan lahan di lokasi rencana kegiatan PT. Putra Barito Lestari terdiri dari Belukar Rawa, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Rawa Sekunder, Perkebunan, Pertambangan, Semak/Belukar, Rawa, dan Tanah Terbuka. Secara umum rencana kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada hutan produksi oleh PT. Putra Barito Lestari terbagi atas 4 (empat) tahapan kegiatan, yaitu tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. Penelitian ini menggunakan metode survey wawancara di mana data yang diperoleh merupakan data primer hasil wawancara dilapangan (in situ) dan data sekunder diambil dari BPS Kab. Katingan. Terdapat 10 pembahasan dalam ANALISIS SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA DALAM PENYUSUNAN AMDAL PADA KEGIATAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PADA HUTAN PRODUKSI PT. PUTRA BARITO LESTARI yaitu kependudukan, Mata Pencarian dan Ketenagakerjaan, Tingkat Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pengeluaran Masyarakat, Pemilikan dan Penguasaan Lahan, Sarana dan Prasarana, Adat Istiadat dan Pola Kebiasaan, Proses Sosial, Sikap dan Presepsi Masyarakat, dan Keresahan Masyarakat dan Potensi Konflik. Hasil Observasi Wawancara pada masyarakat di Kecamatan Katingan Tengah, Katingan Hilir, Tasik Payawan dan Kamipang terdapat 77% masyarakat setuju, 14% tidak setuju dan 8% masih ragu-ragu.

Kata Kunci: *Sosial, Ekonomi, Budaya*

PENDAHULUAN

Rencana kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutanalam pada hutan produksi oleh PBPH PT. Putra Barito Lestari secara administratif terletak di

Kecamatan Katingan Tengah, Katingan Hilir, Tasik Payawan dan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

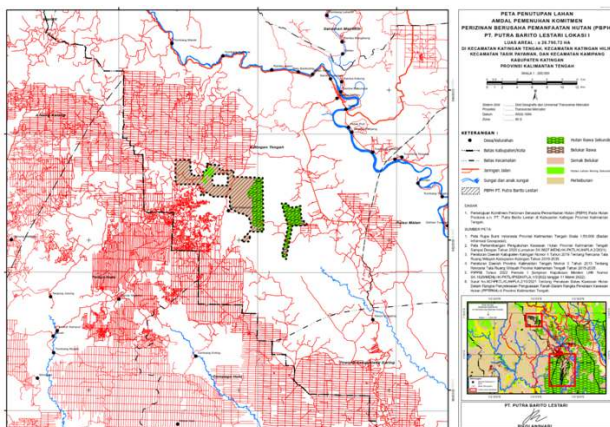
Kondisi tutupan lahan di lokasi rencana kegiatan PT. Putra Barito Lestari terdiri dari Belukar Rawa, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Rawa Sekunder, Perkebunan, Pertambangan, Semak/Belukar, Rawa, dan Tanah Terbuka. Secara umum rencana kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada hutan produksi oleh PT. Putra Barito Lestari terbagi atas 4 (empat) tahapan kegiatan, yaitu tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi.

METODE PENELITIAN

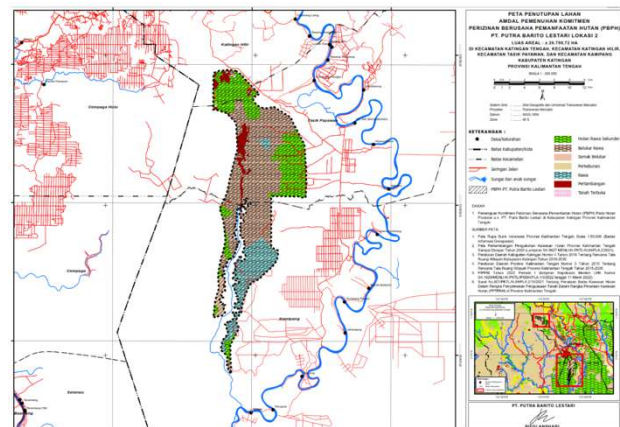
Penelitian ini menggunakan metode survey wawancara di mana data yang diperoleh merupakan data primer hasil wawancara dilapangan (in situ) dan data sekunder diambil dari BPS Kab. Katingan.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa diskusi

kelompok terfokus (FGD-Focuse Group Discussion) dan wawancara mendalam(depth interview). Diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam dilakukan agar peneliti dapat memahami lebih dalam sudut pandang informan penelitian serta latar belakang konteks sosial budaya mereka terkait dengan masalah sosial ekonomi budaya masyarakat. Lebih jauh teknik ini digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit dipahami oleh peneliti karena ketidaktahuan peneliti terhadap apa yang melatarbelakngi pemaknaan terhadap masalah sosial ekonomi budaya masyarakat tersebut dan juga untuk menghindari subyektifitas peneliti terhadap simbol masalah sosial ekonomi budaya masyarakat. Cakupan wilayah penelitian ini adalah di Kecamatan Katingan Tengah, Katingan Hilir, Tasik Payawan dan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 1. Peta Tutupan Lahan Lokasi 1



Gambar 2. Peta Tutupan Lahan Lokasi 2

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kependudukan

Masalah kependudukan merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan, karena menyangkut hampir setiap aspek perencanaan baik bidang sosial, ekonomi maupun politik. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah. Oleh karena itu dalam menangani permasalahan penduduk, selain mengupayakan pengendalian jumlah penduduk, tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Beberapa gambaran yang dapat dilihat dalam menganalisa permasalahan kependudukan antara lain meliputi jumlah dan kepadatan penduduk, persebaran penduduk, pertumbuhan penduduk, dan komposisi penduduk.

Berdasarkan data penduduk tahun 2023, jumlah penduduk di Kecamatan Katingan tahun 2023 sebesar 169.355 jiwa jiwa berdasarkan hasil Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni). Selain itu, jumlah KTP dan

KK di Kabupaten Katingan tahun 2023 yaitu 124.559 buah dan 56.413 buah.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Katingan pada 2023 mencapai 80.066 orang yang menurun dibandingkan jumlah angkatan kerja pada 2022 yang pengukuran suhu perairan sungai Kahayan yang didapatkan adalah 31,7 °C untuk stasiun pertama dan 32,7 mencapai 87.022 orang. Jumlah penduduk yang bekerja dari jumlah angkatan kerja di Kabupaten Katingan pada 2023 sebesar 76.096 orang, yang menurun dibandingkan jumlah penduduk yang bekerja pada 2022 yang mencapai 82.380 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Katingan pada 2023 mencapai 4,96 persen, mengalami penurunan dibandingkan TPT tahun 2022 yang sebesar 5,33 persen. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Katingan tahun 2023 sebesar 3.230.700 rupiah, mengalami kenaikan dibandingkan UMK Katingan tahun 2022 sebesar 2.980.076 rupiah.

Data kependudukan di pada 3 kecamatan di wilayah studi dari rencana kegiatan PBPH PT. Putra Barito Lestari dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan, 2023.

Kecamatan/ Desa	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (orang)
Kec. Katingan Tengah	730	29.707
Mirah Kalanaman	5,3	3.360
Kec. Katingan Hilir	663	42.961
Tewang Kadamba	50	661
Kec. Tasik Payawan	808,26	165
Talingke	82,13	1.222
Hiyang Bana	51,57	335
Petak Bahandang	26,08	183
Tumbang Panggo	77	729
Kec. Kamipang	1.500	5.446
Baun Bango	124	540
Telaga	650	1.301

Sumber : BPS Kecamatan Katingan, 2024

Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk tergolong daerah tidak padat (jarang) karena menurut Badan Pusat Statistik maka di daerah studi kepadatannya kurang dari 200 jiwa/km². termasuk dalam kriteria kepadatan paling rendah, yaitu

Tabel 2. Klasifikasi tingkat kepadatan penduduk

No.	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)	Golongan Daerah
1.	< 200	Tidak padat
2.	200 – 400	Sedang
3.	> 400	Padat

Sumber : BPS Kecamatan Katingan, 2024

Tabel 3. Jumlah dan rasio jenis kelamin penduduk di wilayah studi tahun 2023

Kecamatan/Desa	Penduduk (orang)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Kec. Katingan Tengah	15.748	14.744	30.492	107
Mirah Kalanaman	1.722	1.638	3.360	105
Kec. Katingan Hilir	22.070	40.846	42.961	106
Tewang Kadamba	347	314	661	111
Kec. Tasik Payawan	4.483	4.246	8.729	106
Talingke	300	314	614	96
Hiyang Bana	648	598	335	108
Petak Bahandang	976	923	183	106
Tumbang Panggo	359	370	729	97
Kec. Kamipang	3.992	3.557	7.549	112
Baun Bango	446	450	896	99
Talaga	711	590	1.301	121

Sumber : BPS Kecamatan Katingan, 2024

Memperhatikan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak di wilayah studi yaitu **Kec. Katingan Tengah** berjumlah **30.492** jiwa, dengan rasio jenis kelamin berjumlah 107, **Kec. Katingan Hilir** berjumlah 42.961 jiwa dengan rasio jenis kelamin berjumlah 105, **Kec. Tasik Payawan** berjumlah 8.729 jiwa dengan rasio jenis kelamin berjumlah 106, dan **Kec. Kamipang** berjumlah **7.549** jiwa dengan rasio jenis kelamin berjumlah 112

Jumlah dan persebaran penduduk juga dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas lahan di wilayah itu. Kebanyakan penduduk di wilayah studi ini memang sangat dominan memanfaatkan permukaan lahan untuk kegiatan usahanya, karena sangat luasnya lahan yang tersedia relatif terhadap jumlah penduduknya. Karakteristik jumlah dan persebaran penduduk ditentukan juga oleh jumlah rumah tangga/KK dan rata-rata jiwa per rumah tangga. Data mengenai jumlah rumah tangga dan rata-

rata jiwa per rumah tangga di wilayah studi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Jumlah rumah tangga dan rata-rata jiwa per rumah tangga di wilayah studi

No.	Kecamatan	Kepala Keluarga	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Rata-Rata Penduduk Per Kepala Keluarga
1.	Kec. Katingan Tengah	9.734	1,7	3,13
2.	Kec. Katingan Hilir	13.555	64,8	3,17
3.	Kec. Tasik Payawan	2.839	10,9	3,07
4.	Kec. Kamipang	2.440	2,7	3,09

Sumber : BPS Kecamatan Katingan, 2024

Dari tabel di atas diketahui bahwa di **Kec. Katingan Tengah** terdapat jumlah kepala keluarga 9.734 KK dengan rata-rata penduduk per KK yaitu 3,13 dan tingkat kepadatan penduduk berjumlah 1,7 per km². Di **Kec. Katingan Hilir** jumlah kepala keluarga 13.555 KK dengan rata-rata penduduk per KK yaitu 3,17 dan tingkat kepadatan penduduk berjumlah 64,8 per km², di **Kec. Tasik Payawan** jumlah kepala keluarga 2.839 KK dengan

rata-rata penduduk per KK yaitu 3,07 dan tingkat kepadatan penduduk berjumlah 2,7 per km².

Laju pertumbuhan penduduk suatu wilayah sangat ditentukan oleh adanya kejadian kelahiran, kematian ataupun oleh adanya kejadian migrasi baik yang masuk maupun migrasi keluar. Tingkat pertumbuhan penduduk di wilayah studi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di wilayah studi tahun 2020 – 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2023 (%)
Kec. Katingan Tengah	29.707	1,39
Kec. Katingan Hilir	41.961	2,71
Kec. Tasik Payawan	4.246	2,41
Kec. Kamipang	8.616	1,61
Jumlah	169.355	1,58

Sumber : Sumber : BPS Kecamatan Katingan, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa angka tingkat pertumbuhan penduduk paling signifikan di wilayah studi adalah di Kec. Katingan Hilir dari tahun 2020 - 2023 sebanyak 2,71% dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 41.961 jiwa lebih cepat dibandingkan di Kec. Kamipang berkisar 1,61% dengan jumlah penduduk sebanyak 8.616 jiwa dan di Kec.

Katingan Tengah berkisar 1,39 % dengan jumlah penduduk sebanyak 29.707 jiwa.

Penduduk kelompok umur 15 – 64 tahun adalah kelompok usia produktif yang menanggung beban hidup kelompok umur < 15 tahun dan > 65 tahun. Data jumlah penduduk menurut kelompok umur yang tersedia di tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Katingan pada tahun 2023 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Katingan tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	7.935	7.559	15.494
5-9	7.479	7.102	14.581
10-14	7.853	7.474	15.327
15-19	7.944	7.540	15.484
20-24	7.244	6.932	14.176
25-29	6.753	6.679	13.432
30-34	7.084	6.741	13.825
35-39	6.952	6.404	13.356
40-44	6.470	5.922	12.392
45-49	5.988	5.279	11.267

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
50-54	5.064	4.324	9.388
55-59	4.037	3.351	7.388
60-64	2.862	2.491	5.353
65-69	1.777	1.664	3.441
70-74	1.161	1.128	2.289
75+	1.119	1.043	2.162
Jumlah	87.722	81.633	169.355

Sumber : BPS Kabupaten Katingan dalam Angka, 2024

Berdasarkan data penduduk menurut umur dan jenis kelamin, maka dapat dihitung angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) di Kabupaten Katingan, yakni sebesar kurang lebih 33. Angka ini menunjukkan bahwa beban ketergantungan di wilayah tersebut tinggi karena melebihi nilai 33. Artinya setiap 100 usia produktif harus menanggung 33 usia tidak produktif. Dari aspek ketenagakerjaan yang dianggap sebagai aspek

paling mendasar dalam kehidupan masyarakat karena mencakup berbagai dimensi baik sosial maupun ekonomi. Keberadaan rencana kegiatan PBPH PT. Putra Barito Lestari tidak hanya menjadi alternatif bagi desa-desa di wilayah studi untuk bekerja, akan tetapi tidak menutup peluang bagi masyarakat Kabupaten Katingan secara umum untuk ikut terlibat bekerja pada kegiatan tersebut.

Tabel 7. Angka beban ketergantungan di Kabupaten Katingan tahun 2024

Kabupaten	Penduduk Usia <15 thn	Penduduk Usia 15-64 thn	Penduduk Usia >65 thn	Angka Beban Ketergantungan
Katingan	45.402	116.061	7.892	33

Sumber : BPS Kabupaten Katingan dalam Angka 2024

2. Mata Pencarian dan Ketenagakerjaan

Mata pencarian keluarga di sekitar wilayah PBPH PT. Putra Barito Lestari sebagian besar adalah tidak bekerja sebesar 55%, swasta dan bertani dengan jumlah sebesar 22% dan 15 %. Usaha swasta yang digeluti umumnya berupa Pertambangan dan Pengendalian, Industri Pengolahan. Banyaknya masyarakat yang

menggeluti usaha pertanian disebabkan oleh kondisi wilayah yang sebagian besar areal semak belukar lahan kering sehingga bisa diusahakan untuk lahan budidaya tanaman pangan dan kebun campuran serta buah-buahan. Kemudian sebagai Pegawai Negeri sebanyak 0,4%, di bidang Jasa 8%, dan sisanya tidak bekerja sebanyak 5,5 %.

Tabel 8. Mata pencarian masyarakat di wilayah studi

No.	Mata Pencarian	Jumlah	Presentase
1.	Petani	25.786	15%
2.	Swasta	36.831	22%
3.	Pegawai Negeri	643	0,4%
4.	Jasa	12.836	8%
5.	Tidak Bekerja	93.259	55%
Total		169.355	100 %

Sumber: BPS Kabupaten Katingan dalam Angka 2024

Sebagian penduduk memiliki mata pencarian ganda (pola nafkah ganda) seperti petani yang juga bekerja sebagai penambang atau pendulang emas dan nelayan. Dari sejumlah rumah tangga, beberapa kepala keluarga melakukan pola nafkah ganda atau mempunyai usaha sampingan, sedangkan sisanya memiliki mata pencarian tunggal. Pekerjaan tersebut dilakukan secara bergiliran sesuai dengan kondisi musim. Pada awal musim hujan, sebagian besar penduduk menggarap lahan pertanian. Setelah selesai masa tanam dan sambil

menunggu panen, mereka bekerja sebagai penambang pasir sungai atau pendulang emas.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya yang telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian. Data ketenagakerjaan

diambil dari data BPS Kabupaten Katingan, karena data pada tingkat kecamatan saat ini belum tersedia.

Pada tahun 2023 dari keseluruhan penduduk di wilayah studi yaitu Kabupaten Katingan Tengah, Katingan Hilir, Tasik Payawan, dan Kamipang sebesar **80.066** adalah penduduk angkatan kerja, dan **44.226** bukan merupakan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak 3.970 adalah pengangguran dan yang bekerja

sebanyak 76.096. Sedangkan untuk penduduk yang bukan angkatan kerja diantaranya berstatus masih sekolah sebanyak 9.238, mengurus rumah tangga sebanyak 32.674, dan kegiatan lainnya sebanyak 2.114.

Data mengenai ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Katingan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan di Kabupaten Katingan tahun 2023

Jenis Kegiatan	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	83.436	87.022	80.066
1. Bekerja	78.850	82.380	76.096
2. Pengangguran Terbuka	4.586	4.642	3.970
Bukan Angkatan Kerja	46.172	44.942	44.226

Jenis Kegiatan	2021	2022	2023
Bukan Angkatan Kerja	46.172	44.942	44.226
1. Sekolah	7.056	10.274	9.238
2. Mengurus Rumah Tangga	30.824	31.365	32.674
3. Lainnya	8,292	3.306	2.114
Jumlah	129.608	131.967	124.292
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,38	65,94	64,42
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,50	5,33	4,96

Sumber : Sumber : BPS Kabupaten Katingan dalam Angka 2024

Tabel 10. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kegiatan di Kabupaten Katingan tahun 2024

Pendidikan yang ditamatkan	Angkatan Kerja	
	Bekerja	Pengangguran
0	15.403	67,98
1	14.783	55,25
2	13.025	63,11
3	1.015	87,07
Jumlah	44.226	64,42

Sumber : Kabupaten Katingan dalam Angka, 2024

Tabel 11. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Katingan tahun 2023

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	16.896	7.175	24.071
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	4.154	3.984	8.138
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2.460	149	2.609
Buruh/Karyawan/Pegawai	23.409	6.347	29.756
Pekerja bebas	2.687	681	3.368
Pekerja keluarga/tak dibayar	3.358	4.796	8.154
Jumlah	52.964	23.132	76.096

Sumber : Kabupaten katingan dalam Angka, 2024

Pekerjaan utama di Kabupaten Katingan tahun 2023 adalah sebanyak 76.096, jumlah penduduk sebagai karyawan/pegawai adalah sebanyak 39%, jumlah penduduk sebagai berusaha sendiri sebanyak 24%, dan sisanya penduduk bekerja yang dibayar dan tidak dibayar dan pekrja bebas sebanyak 37%.

3. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Tingkat pendapatan masyarakat di wilayah studi tergantung jenis mata pencaharian, antara lain sebagai Petani, Swasta, PNS, Jasa, Nelayan, dan Tidak Bekerja. Berdasarkan hasil *indepth interview* lapangan oleh tim studi kepada beberapa orang *key informan*, diperoleh

informasi bahwa pendapatan masyarakat di wilayah studi pada berkisar antara Rp.2.000.000–6.000.000 per bulan. Berdasarkan perhitungan data pendapatan terhadap masyarakat di wilayah studi diketahui bahwa rata-rata pendapatan masyarakat sebesar Rp 4.400.000 per bulan. Bidang pekerjaan yang cukup tinggi nilai pendapatannya diperoleh dari mata pencarian sebagai PNS. Jika rata-rata tingkat pendapatan responden ini dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Katingan tahun 2023, yaitu sebesar Rp.3.230.700,- per bulan, maka tingkat pendapatan penduduk di wilayah studi masih berada di atas UMK Kabupaten Katingan.

Tabel 12. Rentang penghasilan berdasarkan jenis pekerjaan

No.	Mata Pencaharian	Penghasilan Tertinggi	Penghasilan Terendah	Rata-rata
1.	Petani	4.000.000	1.000.000	2.500.000
2.	Swasta	6.000.000	2.050.000	4.025.000
3.	PNS	6.000.000	4.000.000	5.000.000
4.	Jasa	4.500.000	2.000.000	3.250.000
5.	Nelayan	2.000.000	1.500.000	1.750.000
6.	Tidak Bekerja	4.000.000	2.000.000	3.000.000

Sumber : Hasil wawancara

4. Tingkat Pengeluaran Masyarakat

Pengeluaran rumah tangga penduduk di wilayah studi meliputi makanan dan non makanan. Berdasarkan menurut BPS Kabupaten Katingan dan survey lapangan oleh tim studi diketahui bahwa pengeluaran setiap rumah tangga penduduk untuk makanan rata-rata sebesar Rp 1.456.664 yang terdiri dari pengeluaran makanan dan

pengeluaran non makanan. Dimana pengeluaran untuk makanan sebesar Rp 849.235 dan pengeluaran Non Makanan sebesar Rp 607.429,- per bulan. Dengan demikian pengeluaran penduduk untuk kebutuhan konsumsi makanan jauh lebih besar dari pada alokasi pengeluaran untuk non makanan, dimana rincian tersebut dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Rentang pengeluaran berdasarkan jenis pekerjaan

No.	Mata Peneharian	Pengeluaran Tertinggi	Pengeluaran Terendah	Rata-rata
1.	Petani	4.000.000	1.000.000	2.500.000
2.	Swasta	6.000.000	2.050.000	4.025.000
3.	PNS	6.000.000	4.000.000	5.000.000
4.	Jasa	4.500.000	2.000.000	3.250.000
5.	Nelayan	2.000.000	1.500.000	1.750.000
6.	Tidak Bekerja	4.000.000	2.000.000	3.000.000

Sumber : Hasil wawancara

Tabel 14. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kabupaten Katingan, 2023

Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan (rupiah) <i>Class of Monthly Expenditure per Capita (rupiahs)</i>	Persentase Penduduk <i>Percentage of</i> <i>Population</i>
< 150 000	0,00
150 000–199 999	0,00
200 000–299 999	0,00
300 000–499 999	1,51
500 000–749 999	9,79
750 000–999 999	17,96
1 000 000–1 499 999	37,00
> 1 500 000	33,73
Jumlah/Total	100,00

Sumber : Kabupaten Katingan dalam Angka, 2024

Tabel 15. Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut Jenis Konsumsi Kabupaten Katingan, 2018-2023

Jenis Konsumsi			
Tahun	Makanan	Non Makanan	Jumlah
2018	577.820	419.269	997.088
2019	677.589	506.363	1.183.952
2020	696.937	467.192	1.164.129
2021	755.959	555.893	1.311.852
2022	839.397	587.261	1.426.658
2023	849.235	607.429	1.456.664

Sumber : Kabupaten katingan dalam Angka. 2024

5. Pemilikan dan Penguasaan Lahan

Berdasarkan ketentuan adat yang turun temurun berlaku di wilayah studi terdapat dua jenis/kategori pemilikan/penguasaan lahan, yaitu penguasaan teritorial dan individu/kelompok. Menurut adat, warga kampung/desa hanya diberi kewenangan untuk membuka lahan hutan dalam wilayah kampungnya. Namun batas wilayah kampung itu sendiri tidak ditentukan secara tegas. Biasanya batas wilayah ini dibuat atau ditentukan oleh kemampuan warga mencapai suatu wilayah. Tidak jelasnya pembatasan wilayah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti masih luasnya wilayah, kecilnya jumlah penduduk, relatif tidak subur nya lahan dan sistem pertanian ladang berpindah-pindah yang membutuhkan wilayah yang luas untuk kepentingan hidupnya. Pembatas

ini berlaku tidak hanya bagi penduduk luar kampung/desa yang menetap di luar kampung/desa namun bagi warga kampung lainnya yang karena menikah dengan wanita setempat. Mereka dapat dibenarkan membuka hutan untuk keperluan huma, tapi ia tidak memiliki hak kepemilikan atas lahan bukaan tersebut. Selain itu bagi pendatang yang menetap harus meminta izin kepada desa/kampung atau meminta izin mertuanya, apabila ia menikah dengan wanita setempat.

Penguasaan wilayah teritorial ini tidak hanya berkaitan dengan lahan hutan, namun berlaku pula terhadap isi di dalamnya, seperti memungut rotan dan hasil lainnya. Jenis pemilikan/penguasaan lainnya adalah hak pemilikan/penguasaan pribadi. Hak ini diperoleh dari hasil pembukaan hutan sendiri atau warisan dari nenek

moyang (keturunan). Lahan yang diperoleh secara waris ini dapat berupa kebun, huma, ataupun hutan sekunder yang telah ditinggalkan atau tidak digarap. Meskipun telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, namun para ahli waris dan sebagian besar penduduk kampung masih mengenal lokasi dan batas kepemilikannya.

Penerusan/penurunan hak kepemilikan terhadap anak cucu dilakukan dengan sistem waris. Hak waris diberikan sama rata baik untuk anak laki-laki maupun wanita. Biasanya pewarisan dilakukan secara bertahap. Artinya, anak yang baru menikah biasanya diberi wewenang untuk menggarap sebidang lahan untuk huma. Lahan tersebut kelak akan menjadi hak anak yang bersangkutan (warisan). Hak waris ini diberi kepada anak (wanita), tetapi hak itu tidak diberikan pada menantu laki-laki.

6. Sarana dan Prasarana

1. Pendidikan

Aspek pendidikan khususnya kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam progresifitas suatu daerah. Hal ini terkait erat dengan keberhasilan pembangunan di

bidang pendidikan. SDM yang berkualitas merupakan modal utama bangsa dalam menjalankan pembangunan. Salah satu faktor penunjang terbentuknya SDM yang berkualitas adalah tingkat pendidikan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang diasumsikan SDM orang yang bersangkutan akan semakin berkualitas.

Pendidikan bagi penduduk atau murid dapat berjalan dengan lancar apabila disertai wadah belajar mengajar dan pengajarnya untuk kemajuan dunia pendidikan. Didukung dengan lengkapnya prasarana dan sarana pendidikan dimaksud, maka salah satu faktor dalam upaya peningkatan pendidikan sudah terpenuhi. Prasarana pendidikan dimaksud adalah jumlah sekolah yang tersedia di lokasi studi. Jumlah sekolah, murid dan guru di desa studi disajikan pada tabel berikut.

Adapun Banyaknya sarana pendidikan dan tenaga pengajar, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), dan persentase penduduk usia 7 – 24 tahun menurut kelompok umur sekolah dan partisipasi sekolah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16. Banyaknya sarana pendidikan dan tenaga pengajar menurut jenjang pendidikan di wilayah studi tahun 2023

Kecamatan / Jenis Sekolah	Sekolah	Murid	Guru
a. Kecamatan Katingan Tengah			
- Taman Kanak-Kanan (TK)	18	674	17
- Raudatul Athfal (RA)	2	2	6
- Sekolah Dasar (SD)	30	3.446	274
- Madrasah Ibtidaiyah (MI)	0	0	0
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)	13	1.387	142
- Madrasah Tsanawiyah (MTS)	1	1	28
- Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	1.236	95
- Madrasah Aliyah (MA)	1	53	11
b. Kecamatan Katingan Hilir			
- Taman Kanak-Kanan (TK)	26	808	79
- Raudatul Athfal (RA)	7	370	38
- Sekolah Dasar (SD)	28	28	352
- Madrasah Ibtidaiyah (MI)	4	1.098	81
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)	9	9	159

Kecamatan / Jenis Sekolah	Sekolah	Murid	Guru
- Madrasah Tsanawiyah (MTS)	6	6	65
- Sekolah Menengah Atas (SMA)	7	7	181
- Madrasah Aliyah (MA)	2	323	29
c. Kecamatan Tasik Payawan			
- Taman Kanak-Kanan (TK)	8	186	14
- Raudatul Athfal (RA)	-	-	-
- Sekolah Dasar (SD)	8	907	81
- Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-	-	-
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)	6	384	54
- Madrasah Tsanawiyah (MTS)	-	-	-
- Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	273	25
- Madrasah Aliyah (MA)	-	-	-
d. Kecamatan Kamipang			
- Taman Kanak-Kanan (TK)	7	194	12
- Raudatul Athfal (RA)	-	-	-
- Sekolah Dasar (SD)	11	123	65
- Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-	-	-
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)	7	281	47
- Madrasah Tsanawiyah (MTS)	1	6	4
- Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	151	4
- Madrasah Aliyah (MA)	1	28	1

Sumber : Kabupaten Katingan dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan dan tenaga pengajar sudah tersedia pada masing-masing wilayah kecamatan wilayah studi, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di wilayah studi sudah tergolong baik, namun untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi/ perguruan tinggi, maka dapat melanjutkan ke

ibukota provinsi yang sudah tersedia sarana pendidikan berupa universitas, yakni Universitas Palangka Raya dan Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan dan universitas lainnya yang ada di Palangka Raya ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 17. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Katingan

Usia	APM		APK	
	2022	2023	2022	2023
SD/MI	98,90	98,88	113,37	111,75
SMP/MTs	76,19	78,14	81,19	79,84
SMA/SMK/MA	67,47	65,7	108,93	108,58

Sumber : Kabupaten Katingan dalam Angka, 2024

Angka Partisipasi Murni (APM) dapat di definisikan sebagai proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2022, Pendidikan Non Formal (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi) turut diperhitungkan. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika

APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, sedangkan APM pada Kab.Katingan menunjukkan dibawah 100 artinya ada anak yang sekolah tidak pada waktu atau keterlambatan sekolah. Kegunaannya adalah untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dapat di definisikan sebagai proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada

kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Katingan tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Kegunaannya adalah Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

2. Agama

Kalimantan Tengah adalah salah satu Provinsi yang terletak di pulau Kalimantan. Ibukota Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya. Kalimantan Tengah mempunyai julukan Bumi Tambun Bungai, dengan semboyan Isen mulang yang artinya Pantang Mundur.

Penduduk etnis yang mendominasi di Kalimantan Tengah yaitu etnis suku Dayak yang merupakan suku asli penduduk Kalimantan Tengah. Sub etnis suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Tengah terdiri dari suku Dayak Ngaju, Bakumpai, Ma'anyan, Kahayan, Ot Danum, Siang, Murung, Taboyan, Lawangan, Dusun serta sub etnis lainnya dalam jumlah relatif. Selain itu, penduduk etnis yang turut mendominasi di Kalimantan Tengah yaitu suku Jawa yang merupakan Daerah transmigrasi,

Banjar yang merupakan Daerah pesisir dan perkotaan serta berbagai etnis lainnya yang terdiri dari etnis Melayu, Madura, Sunda, Bugis, Batak, Flores, Bali serta suku-suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.

Suku Dayak mempunyai kebudayaan yang beragam dan merupakan suku yang menghargai perbedaan. Selain menghargai perbedaan, suku Dayak juga menghargai etnik, agama ataupun latar belakang sosial. Bahasa yang dominan digunakan di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Katingan yaitu bahasa Dayak, Banjar, Jawa dan Indonesia. Kepercayaan yang dianut di Kabupaten Katingan meliputi agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Semuanya hidup berdampingan dan saling bertoleransi yang diatur dalam kerukunan hidup beragama.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kehidupan beragama yang kondusif di mana sesama umat beragama hidup dengan rukun dan saling toleransi, akan dapat menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Kondisi seperti ini merupakan prasyarat agar kegiatan pembangunan berjalan dengan baik. Intensitas keresahan dan potensi konflik bisa direduksi melalui cara agama untuk masyarakat yang agamis.

Umumnya penduduk di kecamatan wilayah studi menganut 4 agama yang didominasi Islam, Kristen, Hindu Kaharingan dan Budha. Data yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Jumlah tempat peribadatan berdasarkan agama di wilayah studi

Kecamatan/Desa	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
Kec.Katingan Tengah	14	3	11	3	12	-
Kec. Katingan Hilir	22	32	23	1	5	-
Kec. Tasik Payawan	11	5	4	-	6	-
Kec. Kamipang	12	7	5	-	1	-

Sumber : Kabupaten Katingan dalam Angka, 2024

7. Adat Istiadat dan Pola Kebiasaan

Masyarakat lokal yang terdapat di wilayah studi masih merupakan kesatuan komunitas yang menjunjung adat istiadat nenek moyang. Di daerah studi, masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan sukunya, yaitu Dayak Ngaju, Dayak Kahayan, Dayak katingan dan suku lainnya seperti suku Banjar, dan Jawa. Asimilasi antar suku sudah sangat dalam dan lama terjadi, sehingga terjalin harmonisasi perilaku dalam kebiasaan hidup sehari-harinya. Komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Dayak Ngaju, Dayak Kahayani, Banjar, dan sebagian bahasa Indonesia.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tradisi adat tetap dipandang dan dihayati sebagai norma, perisai dan sesuatu yang berharga bagi kehidupan masyarakat maupun perorangan. Sikap mereka adalah mentaati dan menghormati segala tradisi adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Semua tradisi dan pola kebiasaan masyarakat lokal. Adat istiadat yang berlaku pada masyarakat di sekitar areal wilayah studi masih bersifat tradisional, tetapi tidak mempunyai corak yang rumit. Simbol kehidupan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk upacara adat masih terlihat menonjol seperti upacara perkawinan, kelahiran, dan kematian.

Berbagai tatanan kelembagaan yang ada selalu berorientasi pada sistem kekerabatan yang berlaku di kalangan komunitas penduduk yang umumnya memiliki hubungan keluarga. Berdasarkan orientasi, diketahui bahwa masyarakat di wilayah studi berpandangan positif terhadap suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Penduduk setempat juga terbuka terhadap pendatang. Namun demikian mereka berharap masyarakat pendatang menghormati adat istiadat setempat, agar terjalin hubungan harmonis dan kerukunan antar sesama warga di daerah tersebut.

Masyarakat di wilayah studi adalah masyarakat pedesaan dengan penduduk yang heterogen, dan tingkat kesibukan yang relatif sedang dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai variasi usaha dan pekerjaan. Namun demikian, masyarakatnya masih mempertahankan dan menjaga nilai-nilai kerukunan dan kebersamaan. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari di antara warga masyarakat bisa meluangkan waktu di antara kesibukannya untuk bercengkerama dengan tetangga. Kegiatan ini membuat interaksi dan komunikasi warga masyarakat terjalin dengan harmonis.

Keresahan masyarakat timbul apabila sesuatu yang terjadi atau dilaksanakan dalam lingkungan mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipahami dan disepakati secara bersama oleh masyarakat tersebut. Sikap dan persepsi masyarakat akan adanya suatu kegiatan pembangunan juga dapat menggambarkan kondisi keresahan dalam masyarakat. Apabila banyak masyarakat yang menyatakan sikap menolak adanya rencana pembangunan, disertai juga dengan persepsi awal yang negatif, maka keresahan dimungkinkan terjadi bila kegiatan pembangunan tersebut tetap dilanjutkan, dan akibat lebih lanjut adalah munculnya konflik horisontal dalam masyarakat antara mereka yang membela dan yang menolak rencana kegiatan tersebut.

Walaupun terdapat beberapa macam suku di wilayah studi, namun masih terlihat kesamaan dalam orientasi nilai-nilai budaya masyarakat. Misalnya dalam hubungan antara sesama manusia, kehidupan gotong-royong dan tolong menolong masih dipegang teguh. Adat istiadat masyarakat meliputi norma-norma dan tata nilai yang berlaku serta kebiasaan adat yang ada, masih mewarnai pola hidup masyarakat setempat. Keaslian ragam budaya masing-masing suku di atas umumnya masih dipertahankan dan masuknya suku dan budaya pendatang tidak mempengaruhi pelaksanaannya, frekuensi dan jenis budaya masyarakat suku lokal/asli.

Dari pengamatan lapangan, diketahui bahwa hukum adat masih dipegang teguh. Siapa saja yang dianggap melanggar adat akan terkena hukuman dan diwajibkan membayar denda yang jumlahnya sesuai dengan sidang yang dilakukan secara adat. Kelompok masyarakat yang bermukim pada daerah-daerah tertentu terdiri dari berbagai suku, seperti Dayak Ngaju, Dayak Kahayan serta pendatang dari Banjar, Jawa, dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut di atas masyarakat desa studi dalam

kehidupan sehari-hari budaya yang sangat menonjol adalah budaya dayak yang didasarkan kepada budaya ajaran Hindu Kaharingan dan menjadi acuan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Adat istiadat yang berlaku pada kelompok masyarakat yang tinggal di desa studi secara umum masih bersifat tradisional. Simbol kehidupan tersebut diwujudkan dalam berbagai kehidupan sehari-hari seperti upacara adat sewaktu membuka hutan, pernikahan, kelahiran dan kematian.

- Upacara Perkawinan

Acara perkawinan yang mereka sebut Pelek Rujin Pengawin yang merupakan upacara adat yang sangat erat dengan keyakinan adat suku Dayak Ngaju. Upacara adat ini menjadi salah satu ciri Dayak Ngaju. Sementara itu, sebagian ritual adat masih dilaksanakan oleh komunitas suku Dayak Ngaju yang telah beralih ke agama Kristen Protestan, Katolik, atau Islam. Ada beberapa orang suku Dayak Ngaju yang ditemui, yang beralih ke agama besar Islam, Kristen Protestan, atau Katolik, tetapi masih tetap memegang keyakinan adat sesuai dengan tradisi yang berlaku di daerah mereka.

Upacara perkawinan, menurut adat masyarakat Dayak Ngaju, dilaksanakan melalui beberapa tahap, dimulai dari acara meminang yang disebut dengan hakumbang, penentuan tanggal perkawinan yang disebut hisek, dan pemberkatan perkawinan yang disebut hasaki hapalas. Khusus untuk masyarakat Dayak Ngaju yang memeluk Hindu Kaharingan, dalam ritual perkawinan terdapat tiga bagian utama yang harus dilaksanakan. Pertama, perkawinan dilandasi dengan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang disebut dengan istilah Pelek Sinde Uju. Kemudian, ucapan kedua mempelai berupa pengakuan terhadap Hindu Kaharingan dengan lima sarahan serta bersumpah sehidup semati, bersama menghadapi problem kehidupan. Selanjutnya, ada yang disebut dengan jalan hadat, yakni perjanjian yang mesti dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada istrinya dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ranying Hatalla Hyang Widhi Wasa.

- Upacara Kehamilan dan Kelahiran

Rangkaian upacara kehamilan dilaksanakan karena diharapkan mampu menjaga si ibu dan bayi yang dikandungnya dari segala gangguan terhadap kehamilan. Rangkaian upacara sudah dimulai pada usia kehamilan tiga bulan, tujuh bulanan (Nyaki Ehet/Dirit) sampai sembilan bulanan (Mangkang Kahang Badak) dalam sebuah upacara yang disebut sebagai Paleteng Kalangkang Sawang. Oleh penganut Kaharingan berbagai pantangan diberikan kepada ibu yang sedang hamil. Pantangan dan tabu tersebut haruslah ditaati dan dilaksanakan oleh si ibu. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan si ibu maupun janin yang ada dalam kandungannya. Setelah proses

kelahiran, maka bentuk upacara selanjutnya pada masyarakat Dayak Ngaju, khususnya yang beragama Hindu Kaharingan adalah palas bidan atau biasa disebut dengan acara pamalasan. Upacara Palas Bidan pada intinya adalah simbol - simbol ungkapan terima kasih dan kebahagiaan kedua orang tua bayi dan keluarga ataskelahiran anak mereka yang dibantu oleh bidan.

- Upacara Kematian (Tiwah)

Ritual Tiwah merupakan upacara kematian yang digelar untuk seseorang yang sudah meninggal dan dimasukkan dalam Runi atau peti mati. Tujuan ritual ini adalah untuk meluruskan perjalanan salumpuk liau menuju lewu tatau dalam konsep kematian Dayak Ngaju.

Ritual Tiwah diselenggarakan ketika seorang Dayak Ngaju yang masih beragama Hindu Kaharingan. Upacara yang diselenggarakan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan sebelum upacara inti Tiwah diselenggarakan. Tahap pra upacara Tiwah ini dilakukan dengan mengumpulkan tulang belulang orang yang akan ditiwahkan. Setelah itu upacara puncak Ritual Tiwah diselenggarakan. Upacara puncak ini yang diadakan 3 hari hingga satu bulan.

8. Proses Sosial

Rencana kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu diperkirakan dapat mempengaruhi proses sosial yang terjadi dalam masyarakat di wilayah studi. Proses sosial yang dimaksud adalah hubungan timbal balik antara berbagai segi kehidupan sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu seperti aspek ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya. Proses sosial yang berlangsung dalam masyarakat sekitar rencana kegiatan merupakan hubungan sosial antar warga, interaksi yang nantinya diperkirakan terjadi antara institusi yang berada di dalam kompleks rencana kegiatan dengan warga masyarakat sekitar. Interaksi yang terjadi antara warga masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di wilayah studi dengan pihak institusi yang merencanakan kegiatan yaitu PT. Putra Barito Lestari dapat mempengaruhi kerjasama maupun konflik sosial yang diperkirakan dapat terjadi.

1. Proses *asosiatif* (kerjasama)

Masyarakat lokal (Suku Dayak) dikenal memiliki keterbukaan terhadap pendatang maupun perbedaan. Hal ini tampak dari pluralitas penduduknya yang terdiri dari berbagai latar belakang suku dan agama. Secara umum masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok masyarakat lokal dan kelompok masyarakat pendatang melalui program transmigrasi dan masyarakat pendatang yang secara alami (spontan) karena bekerja di perusahaan-perusahaan.

Kebudayaan dari daerah asal kedua kelompok masyarakat di atas masih tetap mewarnai kehidupan sehari-hari dalam bentuk pelaksanaan upacara kelahiran, perkawinan, kematian serta upacara adat

lainnya. Kendatipun ikatan budaya masing-masing pihak masih sangat kuat, namun tingkat kohesivitas di masyarakat sangat tinggi dan belum ada benturan-benturan sosial akibat pelaksanaan kegiatan budaya dan adat yang ada. Kehidupan antar suku sehari-hari berjalan sangat harmonis dan erat karena adanya sikap saling terbuka dan hormat menghormati antara satu suku dengan suku lainnya. Hal ini juga didukung oleh sikap penduduk lokal (Suku Dayak) yang sangat terbuka dalam menerima kehadiran suku-suku lain pada wilayah/desa untuk hidup berdampingan secara damai maupun memanfaatkan sumberdaya alam secara bersama-sama. Selain itu warga juga masih melakukan gotong royong, membantu warga yang terkena musibah misalnya bekerjasama mengeluarkan warga dari rumah sakit bila terbentur masalah biaya, membantu warga yang sedang memiliki hajatan dengan cara menyumbang tenaga maupun sumbangan berupa material. Kegiatan yang termasuk akomodasi yaitu semua usaha untuk meredakan pertentangan agar tercapai suatu kestabilan juga terjadi di wilayah studi. Bentuk proses yang akomodatif di wilayah studi antara lain adanya sikap toleransi atau saling hormat menghormati antar umat beragama di wilayah studi yang beragam, dan kompromi sehingga hari-hari besar keagamaan dapat berlangsung damai.

2. Proses-proses *diasosiatif* (konflik sosial)

Masyarakat di wilayah studi dapat digolongkan ke dalam satuan komunitas yang agak terbuka, karena kelompok masyarakat yang bermukim pada daerah-daerah tertentu terdiri dari berbagai beragam suku, antara lain Dayak, Jawa dan Banjar. Budaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang menonjol di masing-masing desa di wilayah studi adalah budaya Dayak dan Banjar.

Masyarakat di wilayah studi adalah penduduk yang heterogen, dan tingkat kesibukan yang relatif tinggi, karena masing-masing individu disibukkan oleh aktivitas guna memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai variasi usaha dan pekerjaan. Namun demikian, masyarakatnya masih mempertahankan dan menjaga nilai-nilai kerukunan dan kebersamaan. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari di antara warga masyarakat bisa meluangkan waktu diantara kesibukannya untuk silaturahmi dengan tetangga. Kegiatan ini membuat interaksi dan komunikasi warga masyarakat terjalin dengan harmonis.

Adat istiadat yang berlaku pada kelompok masyarakat secara umum masih bersifat tradisional. Simbol kehidupan tersebut diwujudkan dalam berbagai kehidupan sehari-hari seperti upacara adat sewaktu pernikahan, kelahiran, dan kematian.

3. Pranata sosial dan orientasi nilai budaya

Kajian tentang orientasi nilai budaya dalam studi ini mengacu pada tatanan kelembagaan dan pranata sosial yang tumbuh dan berkembang sebagai pengaturan tata kehidupan suatu komunitas masyarakat yang bermukim pada suatu daerah tertentu. Berbagai tatanan kelembagaan dimaksud selalu berorientasi pada sistem kekerabatan yang berlaku di kalangan komunitas tersebut.

Kelompok kekerabatan yang terkecil dalam masyarakat lokal yang berdomisili pada desa-desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan yang terkait dengan rencana kegiatan PBPH PT. Putra Barito Lestari adalah keluarga inti sebagai suatu kesatuan yang menghuni suatu rumah dan berkelompok dalam suatu perkampungan/pemukiman. Keluarga inti menempati suatu wilayah tertentu sehingga kelompok pemukiman yang ada merupakan suatu kesatuan keluarga yang luas berdasarkan garis keturunan patrilineal.

Kelembagaan yang berkembang dalam masyarakat meliputi kelembagaan formal berupa aparat desa dan BPD (Badan Perwakilan Desa) dan kelembagaan non formal seperti Lembaga Adat Dayak.

9. Sikap dan Persepsi Masyarakat

Rencana kegiatan PBPH Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Putra Barito Lestari secara umum baru saja diketahui oleh masyarakat setempat, ketika pihak perusahaan dan tim penyusun melakukan sosialisasi atau konsultasi publik dalam hal proses pelibatan masyarakat untuk penyusunan Studi AMDAL kepada masyarakat melalui kepala desa masing-masing. Pada umumnya masyarakat di wilayah studi PT. Putra Barito Lestari memiliki persepsi yang positif terhadap keberadaan dan aktifitas yang akan dilaksanakan oleh perusahaan, bahkan masyarakat sekitar akan dapat menjadi mitra bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kemitraan dimaksud dapat diwujudkan melalui kerjasama antara perusahaan dengan berbagai institusi yang ada di sekitarnya, misalnya lembaga adat, koperasi dan sebagainya.

Berdasarkan hasil survey di lapangan yang dilakukan tim studi, sebagian besar masyarakat menyatakan mendukung kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu oleh PT. Putra Barito Lestari. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan tersebut tercermin lewat tanggapan positif maupun negatif seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel 19. Beberapa persepsi atau tanggapan masyarakat terhadap adanya rencana kegiatan

Persepsi Positif	Persepsi Negatif
- Meningkatkan pendapatan masyarakat	- Pencemaran air sungai
- Terbukanya kesempatan kerja	- Gangguan kamtibmas
- Peluang usaha bertambah	- Warga lokal kalah bersaing
- Ada program CD dan CSR dari perusahaan	- Proses penyelesaian konflik yang tidak tepat
- <u>Kerjasama</u> yang akan dilaksanakan	

Sumber : Hasil pengolahan data survei, 2024

Secara umum penduduk yang menerima kehadiran PT. Putra Barito Lestari lebih banyak dengan alasan mereka bisa menerima kehadiran perusahaan tersebut antara lain adalah bisa membuka lapangan kerja, menciptakan peluang berusaha, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan perusahaan tersebut bisa membantu biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan penduduk sekitarnya sehingga diharapkan penduduk lebih meningkat kesejahteraannya.

Kemudian selebihnya memilih harapan lain, yaitu perusahaan selalu konsisten dengan aturan yang ada dan memberikan pelatihan kepada tenaga kerja lokal agar memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga penyerapan tenaga kerja dapat maksimal. Harapan terhadap proyek pada tahap persiapan adalah sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat secara terbuka. Harapan terhadap proyek

pada tahap operasi adalah rekrutmen tenaga kerja secara terbuka, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menyebarkan informasi terkait dengan rencana kegiatan selanjutnya, manajemen perusahaan akan terus melakukan sosialisasi terutama setelah proses AMDAL selesai dan disetujui oleh instansi terkait.

Hasil survei lapangan mengenai sikap dan persepsi masyarakat di wilayah studi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat setuju dengan rencana kegiatan oleh PT. Putra Barito Lestari. Mereka juga berharap agar pihak perusahaan dapat menjadi pembina dan mitra dalam memajukan wilayah mereka dalam berbagai aspek. Berbagai harapan tersebut akan dituangkan dalam program pengembangan masyarakat (*community development*) oleh pihak PT. Putra Barito Lestari.

Persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap kegiatan perusahaan yang

sudah beroperasi. Adanya penyerapan tenaga kerja lokal, pelaksanaan program CSR yang baik serta mudahnya aksesibilitas memberi persepsi positif pada masyarakat. Sebaliknya minimnya tenaga lokal yang diperkerjakan, tidak/belum direalisasikannya program CSR yang telah disepakati serta kondisi infrastruktur yang rusak memberi persepsi negatif dan bahkan konflik di masyarakat.

Dari hasil wawancara terungkap bahwa sebagian besar responden dari penduduk di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Katingan Tengah, Kec. Katingan Hilir, Kec. Tasik Payawan, dan Kec. Kamipang sudah mengetahui adanya rencana kegiatan oleh PT. Putra Barito Lestari. Dari

responden tersebut berupa aparat pemerintah desa seperti Kepala Desa, BPD, Ketua RT, dan beberapa masyarakat yang ditemui. Diharapkan responden dari aparat pemerintah desa akan menghimbau dan akan memberitahu kepada masyarakat lainnya bahwa akan adanya rencana kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu oleh PT. Putra Barito Lestari.

Berdasarkan penjelasan di atas hasil survei lapangan mengenai sikap dan persepsi masyarakat di wilayah studi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat setuju dengan rencana oleh PT. Putra Barito Lestari.

Tabel 20. Informasi mengenai keberadaan rencana kegiatan oleh masyarakat di wilayah studi

Kecamatan/ Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah RT	Jumlah 6% Sampel	Tahu 30%	Tidak Tahu 70%
<u>Kec. Katingan Tengah</u>	30.492	81	1830	549	1281
<u>Mirah Kalanaman</u>	3.360	5	202	60	141
<u>Kec. Katingan Hilir</u>	42.961	45	2578	773	1804
<u>Kec. Tasik Payawan</u>	8.729	45	524	157	367
<u>Talingke</u>	614	4	37	11	26
<u>Hiyang Bana</u>	335	10	20	6	14
<u>Petak Bahandang</u>	183	4	11	3	8
<u>Kec. Kamipang</u>	7.549	37	453	136	317
<u>Baun Bango</u>	896	4	54	16	38

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa masyarakat di sekitar wilayah studi, menyatakan setuju atas keberadaan proyek dengan jumlah total berkisar rata-rata 77 %. Sikap setuju disertai dengan beberapa harapan yang terungkap dari responden seperti:

1. Menghormati adat istiadat penduduk setempat
2. Memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal (masyarakat yang berada di sekitar wilayah PBPH PT. Putra Barito Lestari).
3. Pihak PT. Putra Barito Lestari benar-benar berkomitmen melaksanakan program CSR sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk itu PT. Putra Barito Lestari akan berkoordinasi dengan pihak aparat Kelurahan/Desa, aparat kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Katingan agar program-program tersebut tidak tumpang tindih dengan program pemerintah.
4. Agar pihak PT. Putra Barito Lestari dapat bekerjasama dengan kelompok-kelompok tani sekitar kegiatan.
5. perusahaan melaksanakan program pengembangan masyarakat (*community development*) dengan sungguh-sungguh.
6. perusahaan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan tidak membuang limbah sembarangan.

Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju berkisar rata-rata 14 % dan ragu-ragu (bingung) berkisar

rata-rata 8 %. Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju karena mengkhawatirkan kegiatan PBPH PT. Putra Barito Lestari akan merusak lingkungan seperti terjadinya degradasi hutan. Kekhawatiran lainnya oleh responden adalah tentang lahan yang digarap oleh masyarakat dan tenaga kerja dari luar yang tidak melibatkan masyarakat setempat.

Disamping itu, sebagian kecil masyarakat yang menyatakan tidak setuju karena mengkhawatirkan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu oleh PT. Putra Barito Lestari akan merusak lingkungan yang menyebabkan pencemaran kualitas air permukaan. Selain itu, sumberdaya hutan yang menjadi sumber pendapatan mereka, dikhawatirkan akan hilang. Pernyataan ini, umumnya terungkap dari responden yang bekerja sebagai petani (padi, karet, dan rotan) dan nelayan. Sedangkan yang tidak memberikan tanggapan dikarenakan kurang lancarnya komunikasi dan atau karena tidak memahami secara umum atas manfaat dan resiko akibat kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

Adapun dasar responden menyatakan setuju atas keberadaan proyek adalah mereka sudah terbiasa dengan kegiatan perusahaan-perusahaan lainnya di sekitar wilayah PBPH PT. Putra Barito Lestari. Sikap setuju juga karena adanya harapan masyarakat untuk diterima

sebagai pekerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif dengan tingkat upah yang layak. Disamping itu sebagian masyarakat menyatakan setuju karena mengharapkan dilaksanakan program *community development* oleh perusahaan sehingga keberadaan perusahaan dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil survei lapangan oleh tim studi, menunjukkan bahwa masyarakat lokal cukup terbuka terhadap warga pendatang. Hal ini disebabkan selama ini penduduk lokal telah terbiasa bersosialisasi dengan berbagai suku dari daerah lain. Ketaatan pada norma hukum dan adat istiadat turun temurun merupakan kewajiban seluruh warga masyarakat (lokal dan pendatang).

Sikap setuju tersebut dilatarbelakangi oleh harapan adanya tenaga kerja pendatang yang mempunyai keahlian tertentu dapat memperluas wawasan penduduk lokal dan sekaligus sebagai motivasi untuk meningkatkan pendidikan maupun pengetahuan masyarakat. Sedangkan responden yang tidak setuju khawatir tidak mampu bersaing dalam ketenagakerjaan dalam peluang usaha dengan adanya tenaga kerja pendatang. Kendatipun sebagian besar masyarakat menyatakan setuju dengan adanya rencana kegiatan di wilayah mereka, masyarakat berharap perusahaan dapat melaksanakan pengelolaan lingkungan secara baik sehingga tidak mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya.

10. Keresahan Masyarakat dan Potensi Konflik

Potensi konflik yang mungkin akan timbul diantaranya mengenai masalah pengadaan tenaga kerja yang jumlahnya sebagian bukan dari anggota masyarakat setempat, sehingga untuk mengatasinya diperlukan pemberdayaan masyarakat. Keresahan juga dirasakan masyarakat pemilik usaha perkebunan di dalam areal lokasi kegiatan, mengenai masalah kompensasi lahan ataupun pengaturan pola kemitraan nantinya.

Mekanisme resolusi konflik

Konflik sosial menjadi salah satu masalah yang serlus, hal ini sebagai konsekuensi logis dari adanya fenomena semangat kebebasan warga dalam tata kehidupan masyarakat. Disatu sisi kebebasan menjadi salah satu instrumen efektif dalam proses pengendalian namun pada sisi lain kebebasan yang kebablasan menyimpang norma, aturan, dapat mengakibatkan berbagai permasalahan sosial yang pada gilirannya dapat memunculkan atau berkembangnya konflik secara terbuka, sehingga sering menimbulkan kerugian harta benda bahkan korban jiwa. Pencegahan konflik sosial menjadi salah satu hal yang penting dalam penanganan konflik sosial untuk meminimalkan berkembangnya konflik secara terbuka, sehingga dapat diminimalisir sekecil mungkin, dan dampaknya tidak menimbulkan gangguan keamanan dalam masyarakat. Pencegahan konflik sosial mensyaratkan adanya peningkatan kapasitas

kelembagaan dengan memelihara kondisi damai dalam masyarakat, pengembangan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, peredaman potensi konflik, dan pembangunan sistem peringatan dini. Pencegahan konflik hakikatnya sudah dilakukan oleh PT. Putra Barito Lestari.

Bentuk-bentuk penyelesaian masalah akan sangat ditentukan oleh karakteristik kondisi sosial yang ada di dalam dan sekitar kawasan yang dikelola. Beberapa langkah yang ditempuh oleh PT. Putra Barito Lestari untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat sekitar yaitu sebagai berikut.

a. Inventarisasi sumber konflik

PT. Putra Barito Lestari akan melakukan kegiatan inventarisasi secara menyeluruh sumber-sumber dampak yang menyebabkan terjadinya konflik.

b. Analisa timbulnya konflik

Setelah mengetahui sumber-sumber konflik dari hasil inventarisasi, maka barulah dapat dilakukan analisa kemungkinan terjadinya konflik yang timbul akibat sumber dampak tersebut, diantaranya persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. Putra Barito Lestari, penguasaan dan penggunaan atas lahan (konflik kepentingan atas lahan), kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan hilangnya kesempatan kerja.

c. Pendekatan penyelesaian konflik

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh PT. Putra Barito Lestari untuk menyelesaikan konflik yang terjadi akibat adanya kegiatan terminal khusus dengan masyarakat antara lain sebagai berikut.

1) Pendekatan hukum

➤ Dalam pengadaan tenaga kerja perlu memberikan informasi tentang kesempatan kerja kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan kualifikasi melalui pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan media, seperti pengumuman di kantor kelurahan dan melakukan seleksi terhadap calon tenaga kerja sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi yang telah ditentukan;

➤ Untuk kesempatan berusaha, perusahaan melakukan fasilitasi dan menampung bahan material dan bahan kebutuhan lainnya dari masyarakat yang diperlukan perusahaan.

2) Pendekatan sosial ekonomi

➤ Sosialisasi secara kontinyu dan berkesinambungan kepada masyarakat tentang rencana kegiatan pembangunan hutan tanaman industri yang akan dilaksanakan, dan masalah sistem pengelolaan lingkungan khususnya pencemaran terhadap lingkungan;

➤ Dalam pengadaan tenaga kerja perlu diberikan pemahaman kepada para calon tenaga kerja

- tentang peraturan dan tata tertib perusahaan bagi karyawan;
- Dalam kesempatan berusaha, perusahaan memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal atau masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan perusahaan.
- 3) Pendekatan institusi
- Membentuk divisi yang menangani masalah sosial dalam struktur organisasi perusahaan;

- Melakukan koordinasi dengan kelembagaan masyarakat, kepala (adat, agama, pemuda, dll) dan pemerintah daerah setempat;

DAFTAR PUSTAKA

- Kabupaten Katingan Dalam Angka 2024.
Kecamatan Kamipang dalam Angka 2024.
Kecamatan Katingan Hilir dalam Angka 2024.
Kecamatan Tasik Payawan dalam Angka 2024
Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Katingan Tahun 2022-2027.